

**Balai Besar Teknik  
Kesehatan Lingkungan  
Dan Pengendalian  
Penyakit Yogyakarta**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

Jl Wiyoro Lor No.21 Baturetno, Banguntapan, Bantul  
Yogyakarta 55197

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 11 Januari 2019



**Dr. dr. Irene, M.KM**  
NIP 197206032002122008

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
VI. Lampiran dan Daftar	

# BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA

Jl. Wiyoro Lor No.21 Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55197  
TELEPON 0274 371588, FAXIMILE 0274-443284

---

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 11 Januari 2019

Kepala,



Dr. dr. Irene, M.KM  
NIP 197208032002122008

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.582.035.210 atau mencapai 181,83 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.420.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp54.020.194.896 atau mencapai 94,90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp56.920.595.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018 .

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar 67.868.054.059 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp668.802.871; Aset Tetap (neto) sebesar Rp66.928.929.813; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp270.321.375.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.624.648 dan Rp67.867.429.411.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.577.623.160, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp24.710.368.620 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(22.132.745.460). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus/(Defisit) sebesar Rp.7.006.890 dan defisit sebesar Rp(0) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(22.125.738.570)

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp38.185.088.295 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(22.125.738.570) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp(0) , ditambah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp51.805.774.686 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp.67.865.124.411.

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN****BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN  
PENYAKIT YOGYAKARTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-18		% thd Angg	31-Des-17
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.420.000.000	2.582.035.210	181,83	2.544.968.197
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.420.000.000</b>	<b>2.582.035.210</b>	<b>181,83</b>	<b>2.544.968.197</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	13.338.804.000	13.068.011.105	97,97	12.672.366.156
Belanja Barang	B.4	8.732.894.000	7.915.637.871	90,64	6.328.274.377
Belanja Modal	B.5	34.848.897.000	33.036.545.920	94,80	8.424.117.156
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>56.920.595.000</b>	<b>54.020.194.896</b>	<b>94,90</b>	<b>27.424.757.689</b>

## II. NERACA

### BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA NERACA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-18	31-Des-17
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.8	-	-
Persediaan	C.9	668.802.871	1.028.352.409
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>668.802.871</b>	<b>1.028.352.409</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.13	11.569.611.120	11.569.611.120
Peralatan dan Mesin	C.14	35.316.946.924	34.516.063.644
Gedung dan Bangunan	C.15	40.791.848.640	8.309.024.500
Aset Tetap Lainnya	C.17	4.056.287.470	4.056.287.470
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(24.805.764.341)	(21.459.141.373)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>66.928.929.813</b>	<b>36.991.845.361</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.20	298.313.000	230.965.000
Aset Lain-Lain	C.21	508.713.000	508.713.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(536.704.625)	(517.542.375)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>270.321.375</b>	<b>222.135.625</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>67.868.054.059</b>	<b>38.242.333.395</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	624.648	57.245.100
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>624.648</b>	<b>57.245.100</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>624.648</b>	<b>57.245.100</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.26	67.867.429.411	38.185.088.295
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>67.867.429.411</b>	<b>38.185.088.295</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>67.868.054.059</b>	<b>38.242.333.395</b>



### III. LAPORAN OPERASIONAL

## BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-18	31-Des-17
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.577.623.160	2.281.589.362
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.577.623.160</b>	<b>2.281.589.362</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	13.011.390.653	12.724.858.810
Beban Persediaan	D.3	1.270.347.772	1.004.091.133
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.037.332.065	2.386.821.561
Beban Pemeliharaan	D.5	757.217.444	886.639.070
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.036.045.422	1.921.017.518
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	229.945.046	280.944.701
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.368.090.218	2.676.074.448
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	(11.200)
Beban Lain-lain	D.11	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>24.710.368.620</b>	<b>21.880.436.041</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(22.132.745.460)</b>	<b>(19.598.846.679)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	-	250.645.746
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	448.949.781
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		7.006.890	41.354.603
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	982.940
Defisit Selisih Kurs		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>7.006.890</b>	<b>(157.932.372)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(22.125.738.570)</b>	<b>(19.756.779.051)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNB	D.13	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(22.125.738.570)</b>	<b>(19.756.779.051)</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN  
PENYAKIT YOGYAKARTA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-18	31-Des-17
EKUITAS AWAL	E.1	38.185.088.295	28.815.246.615
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(22.125.738.570)	(19.756.779.051)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.5	-	4.223.866.685
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.6	2.305.000	(5.435.446)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.7	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	51.805.774.686	24.908.189.492
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		29.682.341.116	9.369.841.680
EKUITAS AKHIR	E.9	67.867.429.411	38.185.088.295

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Teknik Kesehatan

##### Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai Peraturan Menkes RI nomor 2349/MENKES/Per/XI/2011 tanggal 22 November 2011. Entitas berkedudukan di Jalan Wiyoro Lor Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta.

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra.

Dalam melaksanakan tugas BBTCLPP Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan surveilans epidemiologi
- Pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL)
- Pelaksanaan laboratorium rujukan
- Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna
- Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi
- Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini, dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana.
- Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra.
- Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BBTCLPP.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta berkomitmen dengan visi "Terwujudnya Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong."

Untuk mewujudkan visi tersebut BBTCLPP Yogyakarta melakukan beberapa langkah-langkah strategis melalui misi sebagai berikut:

- Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
- Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial

lainnya.

*Basis Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar*

*Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan*

*Akuntansi*

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

#### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

#### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan pengendalian Penyakit Yogyakarta adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pemeriksaan diakui setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan/Diklat dan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek diakui setelah pelayanan selesai dilaksanakan

- Pendapatan Sewa rumah dinas diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- kuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

### **(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

#### **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada



tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barag Milik Negara yang diperoleh sampai 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah

di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk obyek penilaian selain tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN

*Penyusutan Aset  
Tetap*

### **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian

yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya*

**Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software Komputer</i>	<b>4</b>
<i>Franchise</i>	<b>5</b>
<b>Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.</b>	<b>10</b>

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang
 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

    - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Sehingga harus dilakukan revisi anggaran di kementerian/lembaga tanpa merubah nilai total anggaran. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.420.000.000	1.420.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.420.000.000</b>	<b>1.420.000.000</b>
Belanja		
Belanja Pegawai	13.338.804.000	13.338.804.000
Belanja Barang	8.730.794.000	8.732.894.000
Belanja Modal	34.850.997.000	34.848.897.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>56.920.595.000</b>	<b>56.920.595.000</b>

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan  
Rp2.582.035.210

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.582.035.210 atau mencapai 181,83 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.420.000.000. Pendapatan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta terdiri dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (425131)	-	4.863.923	0,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi di Bid Kesehatan(425285)	1.410.000.000	2.534.040.054	179,72%
Pendapatan Layanan pendidikan dan /atau Pelatihan (425421)	10.000.000	32.620.001	326,20%
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek (425431)	-	2.200.000	0%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811)	-	3.899.182	0%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911)	-	4.412.050	0%
<b>Jumlah</b>	<b>1.420.000.000</b>	<b>2.582.035.210</b>	<b>181,83</b>

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,46 persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pemeriksaan sampel di tahun 2018.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (423129)		250.645.746	(100,00)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi di Bid Kesehatan	2.534.040.054	2.281.298.000	11,08
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan (425131)	4.863.923	-	0,00
Pendapatan Layanan pendidikan dan /atau Pelatihan (425421)	32.620.001		0,00
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek (425431)	2.200.000		0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811)	3.899.182	10.796.362	-63,88
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911)	4.412.050	1.984.649	122,31
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (423952)	-	243.440	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.582.035.210</b>	<b>2.544.968.197</b>	<b>1,46</b>

Realisasi Belanja Negara  
Rp54.020.194.896

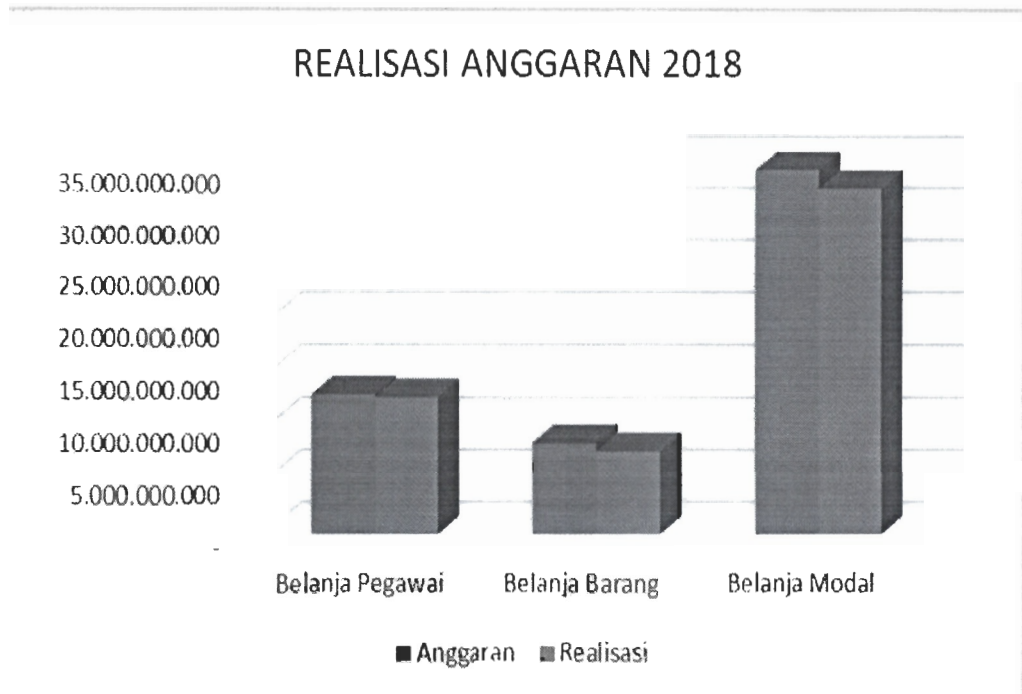
**B.2. Belanja**

Realisasi Belanja instansi pada TA 2018 adalah sebesar Rp54.020.194.896 atau 94,94 persen dari anggaran belanja sebesar Rp56.920.595.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018*

URAIAN	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	13.338.804.000	13.079.974.021	98,06
Belanja Barang	8.732.894.000	7.916.437.871	90,65
Belanja Modal	34.848.897.000	33.043.385.920	94,82
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>56.920.595.000</b>	<b>54.039.797.812</b>	<b>94,94</b>
Pengembalian Belanja	-	19.602.916	
<b>Jumlah</b>	<b>56.920.595.000</b>	<b>54.020.194.896</b>	<b>94,90</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 96,98 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya kenaikan tunjangan kinerja dan adanya anggaran untuk pembangunan gedung laboratorium BBTCLPP Yogyakarta.

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	13.068.011.105	12.672.366.156	3,12
Belanja Barang	7.915.637.871	6.328.274.337	25,08
Belanja Modal	33.036.545.920	8.424.117.156	292,17
<b>Jumlah</b>	<b>54.020.194.896</b>	<b>27.424.757.649</b>	<b>96,98</b>

Belanja Pegawai  
Rp13.068.011.105

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp13.068.011.105 dan Rp Rp12.672.366.156. Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,12 persen dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kenaikan pangkat (KP), kenaikan gaji berkala (KGB), dan belanja tunjangan kinerja.



Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.648.042.969	7.730.960.965	(1,07)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	0,00
Belanja Honorarium	0	0	0,00
Belanja Lembur	29.494.000	26.069.000	13,14
Belanja Tunj Khusus/Kegiatan	5.402.437.052	4.917.222.425	
Belanja Vakasi	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>13.079.974.021</b>	<b>12.674.252.390</b>	<b>3,20</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	11.962.916	1.886.234	534,22
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>13.068.011.105</b>	<b>12.672.366.156</b>	<b>3,12</b>

Rincian Pengembalian belanja pegawai TA 2018 sebesar Rp.11.962.916 terdiri dari:

Kode Akun	Uraian	Pengembalian Belanja
511119	Belanja Pembulatan	630
511124	Belanja Tunjangan Umum	1.305.000
511129	Belanja Uang Makan	70.000
512411	Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan	10.587.286
	<b>Jumlah Pengembalian</b>	<b>11.962.286</b>

Belanja Barang  
Rp7.915.637.871

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.915.637.871 dan Rp6.328.274.377. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 25,08 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya kenaikan anggaran kegiatan dan semua kegiatan dapat terlaksana.

Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017

URAIAN	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.107.555.046	841.287.890	31,65
Belanja Barang Non Operasional	702.415.940	764.903.809	(8,17)
Belanja Jasa	1.222.655.579	780.629.862	56,62
Belanja Pemeliharaan	731.345.514	686.733.510	6,50
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.036.045.422	1.921.017.518	58,04
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	994.577.370	1.128.042.945	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	41.536.000	51.709.843	0,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	80.307.000	153.949.000	(47,84)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>7.916.437.871</b>	<b>6.328.274.377</b>	<b>25,10</b>
Pengembalian Belanja	800.000	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7.915.637.871</b>	<b>6.328.274.377</b>	<b>25,08</b>

### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp33.036.545.920 dan Rp8.424.117.156. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 292,17 persen dibandingkan TA 2017 disebabkan adanya kenaikan anggaran belanja modal berupa anggaran untuk pembangunan gedung Laboratorium BBTCLPP Yogyakarta.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	486.373.780	7.301.172.296	(93,34)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.489.664.140	1.028.751.500	3058,16
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	67.348.000	94.193.360	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>33.043.385.920</b>	<b>8.424.117.156</b>	<b>292,25</b>
Pengembalian	6.840.000	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>33.036.545.920</b>	<b>8.424.117.156</b>	<b>292,17</b>

#### B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2018 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan tahun 2018 dan 2017 tidak terdapat anggaran untuk pengadaan tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 adalah sebesar

Rp486.373.780, mengalami penurunan sebesar 93,34 persen bila di dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Hal ini disebabkan alokasi anggaran dan volume untuk belanja modal peralatan dan mesin tahun 2018 lebih kecil bila dibandingkan tahun 2017. Sehingga realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan tahun 2017.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017*

URAIAN	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	NAIK (TURUN) %
Kendaraan dinas roda-4	0	1.554.422.500	0,00
Peralatan Laboratorium	196.547.600	5.201.857.281	(96)
Fasilitas Perkantoran	58.613.500	86.108.565	-31,93
Peralatan Pendukung Kantor	18.970.000	75.450.000	(75)
Alat Pengolah Data	212.242.680	383.333.950	-44,63
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>486.373.780</b>	<b>7.301.172.296</b>	<b>(93,34)</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>486.373.780</b>	<b>7.301.172.296</b>	<b>(93,34)</b>

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Rp32.489.664.140*

**B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.32.489.664.140 dan Rp.1.028.751.500. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2018 lebih besar dari pada tahun 2017.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan Kantor	32.489.664.140	1.028.751.500	3058,16
Gedung dan Bangunan Rumah Negara	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>32.489.664.140</b>	<b>1.028.751.500</b>	<b>3058,16</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>32.489.664.140</b>	<b>1.028.751.500</b>	<b>3058,16</b>

Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.32.489.664.140 merupakan belanja kegiatan pembangunan Gedung Laboratorium BBTCLPP Yogyakarta

Belanja Modal Jalan,  
Irigasi, dan Jaringan  
Rp0

#### B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal TA 2018 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan satker BBTKLPP Yogyakarta tidak ada belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	Naik (Turun)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Belanja Modal Lainnya  
Rp.67.348.000

#### B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp67.348.000 dan Rp.94.193.360. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan 2017 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya pengurangan anggaran untuk pengembangan web dan software BBTKLPP Yogyakarta.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	Naik (Turun)
Belanja Modal Lainnya	67.348.000	94.193.360	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Belanja Bantuan Sosial  
Rp0

#### B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 tidak mengalami kenaikan/penurunan karena satker BBTKLPP Yogyakarta tidak mempunyai Belanja Bantuan Sosial.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017*

URAIAN	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2017	NAIK (TURUN) %
-	-	-	-

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017*

Keterangan	31-Des-18	31-Des-17
Bank BPD Senopati No.acc 066.111.000044	-	
Uang Tunai	-	
Kwitansi Belum SP2D	-	
Uang Muka Kerja	-	
<b>Jumlah</b>	-	-

Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp0

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 2017*

Keterangan	31-Des-18	31-Des-17
Bank	-	-
Uang Tunai	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Kas Lainnya dan Setara  
KasRp0

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 2017*

Jenis	31-Des-18	31-Des-17
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah Yang Belum Disahkan	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Piutang Bukan Pajak  
Rp0

#### C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Sistem pembayaran pengujian di BBTCLPP Yogyakarta dilakukan di muka, sehingga satker tidak memiliki Piutang PNBPN. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017*

Uraian	31-Des-18	31-Des-17
Piutang PNBPN	-	-
Piutang Lainnya	-	-

Rincian Piutang PNBPN per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Nama Debitur	Kualitas Piutang	Jumlah Piutang
-	-	-
<b>Jumlah</b>		-

Bagian Lancar Tagihan  
TP/TGR  
Rp0

#### C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 2017*

No	Nama	31-Des-18	31-Des-17
-		-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-

Bagian Lancar TPA  
Rp0

### C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian TPA per 31 Desember 2018 dan 2017*

No	Nama	31-Des-18	31-Des-17
-		-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Piutang  
Jangka Pendek  
Rp 0

### C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

Belanja Dibayar di Muka  
Rp0

### C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2018 dan 2017*

Jenis	31-Des-18	31-Des-17
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Pendapatan yang Masih  
Harus Diterima Rp0

### C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2018 dan 2017*

Jenis	31-Des-18	31-Des-17
Pendapatan Jasa Pemeriksaan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Rincian Pendapatan Jasa Pemeriksaan PNBP Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2018 terdiri dari:*

No.	Nama Debitur	Jumlah
1	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Persediaan  
Rp668.802.871

### C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp668.802.871 dan Rp1.028.352.409.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017*

Persediaan	31-Des-18	31-Des-17
Barang Konsumsi	57.843.213	93.072.230
Barang untuk Pemeliharaan	6.077.100	280.000
Suku Cadang	-	-
Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan ke Masyarakat Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan ke Masyarakat	316.521.274	408.939.320
Bahan Baku	288.361.284	526.060.859
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>668.802.871</b>	<b>1.028.352.409</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR  
Rp0

### C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan



Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 2017*

No	Debitur	31-Des-18	31-Des-17
	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-

TPA  
Rp0

### C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA per 31 Desember 2018 dan 2017*

No	Debitur	31-Des-18	31-Des-17
	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih –Piutang  
Jangka Panjang  
Rp(0)

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp(0) dan Rp(0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR dan PA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

#### C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan pengendalian penyakit Yogyakarta per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp11.569.611.120 dan Rp11.569.611.120. Tidak terdapat kenaikan nilai aset tetap Tanah karena tidak ada anggaran untuk belanja tanah di tahun 2018.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>11.569.611.120</b>
Mutasi tambah:	
- Saldo awal	0
- Koreksi Nilai Tanah / Revaluasi aset	0
Pembelian	
- Pengadaan tanah	0
Mutasi kurang:	
	0
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>11.569.611.120</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Tanah TA 2018

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	826m <sup>2</sup>	Wirokerten Banguntapan, Bantul	2.058.392.000
2	1060m <sup>2</sup>	Jl. Wiyoro Lor, Banguntapan, Bantul	2.528.100.000
3	130m <sup>2</sup>	Jl. Golo, Umbulharjo, Yogyakarta	567.870.000
4	3.078m <sup>2</sup>	Jl. Imogiri Timur, Wirokerten, Banguntapan, Bantul	6.415.249.120
<b>Jumlah</b>			<b>11.569.611.120</b>

Tanah seluas 826m<sup>2</sup> merupakan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II yang sudah diubah menjadi Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I, berlokasi di Wirokerten Banguntapan Bantul, Yogyakarta. Tanah seluas 1060m<sup>2</sup> merupakan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah untuk kantor BBTCLPP Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Wiyoro Lor Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Tanah seluas 130m<sup>2</sup> merupakan Tanah Rumah Negara Golongan III yang sudah diubah menjadi Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I, berlokasi di Jl.Golo, Umbulharjo, Yogyakarta. Sedangkan Tanah seluas 3.078m<sup>2</sup> merupakan tanah yang akan digunakan untuk Gedung Kantor Pemerintah dan berlokasi di Jl. Imogiri Timur, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

### C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp35.316.946.924 dan Rp34.516.063.644. Kenaikan aset tetap Peralatan dan Mesin TA 31 Desember 2018 tidak sama dengan belanja modal peralatan dan mesin karena adanya peralatan dan mesin ekstrakomptabel sebesar Rp.5.505.500, dan adanya transfer masuk dari Direktorat P2VTZ Kementerian Kesehatan.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>34.516.063.644</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	480.868.280
Transfer masuk	320.015.000
Penyelesaian KDP	0
Reklasifikasi Masuk	0
<b>Mutasi kurang:</b>	0
Reklasifikasi Keluar	0
Pemindahan aset tetap ke aset lainnya/penghentian aset c penghapusan	- -
<b>Saldo per 31 Des 2018</b>	<b>35.316.946.924</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2018</b>	<b>-24.203.082.507</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>11.113.864.417</b>

Mutasi tambah berupa:

- Penambahan melalui pembelian fasilitas kantor sebesar Rp71.575.300 yang terdiri dari 7 (tujuh) unit AC sebesar Rp47.613.500, 2 (dua) unit mesin absensi sebesar Rp12.961.800 dan maubeler sebesar Rp.11.000.000;
- Penambahan melalui pembelian alat pengolah data sebesar Rp199.280.880 yang terdiri dari 6 (enam) unit Notebook, 5 (lima) unit PC, 8 (delapan) unit printer, 18 (delapan belas) unit UPS, dan 5 (lima) unit harddisk eksternal;
- Penambahan melalui pembelian alat pendukung kantor berupa alat pendukung TTG sebesar Rp.13.970.000 dimana beberapa item barang didalamnya masuk ke aset ekstrakomptabel sebesar Rp.3.850.000 dan pembelian HT sebesar Rp.5.000.000;
- Penambahan melalui pengadaan paket peralatan laboratorium sebesar Rp145.921.600, dimana beberapa item barang didalamnya masuk aset ekstrakomptabel sebesar Rp1.655.500, pembelian pippete sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp.48.146.000 dan alat lab separating funnel glass stopcock 2000ml sebesar Rp.2.480.000;
- Penambahan melalui transfer masuk dari Direktorat PPVTZ Ditjen P2P Kemenkes yaitu berupa 1 (satu) unit alat pewarna slide Filariasis senilai

Rp.249.415.000 dan 4 (empat) unit Mikroskop Binokuler Filariasis sebesar Rp.70.600.000 ;

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan  
Rp40.791.848.640.

### C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp40.791.848.640 dan Rp8.309.024.500. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>8.309.024.500</b>
Mutasi tambah:	
- Pembangunan Gedung & bangunan	32.482.824.140
- Pengembangan aset	-
- Reklasifikasi Masuk	-
- Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	
- Revaluasi Aset	-
- Reklasifikasi Keluar	-
<b>Saldo per 31 Des 2018</b>	<b>40.791.848.640</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2018	(602.681.834)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>40.189.166.806</b>

Per 31 Desember 2018 terjadi mutasi tambah terhadap aset tetap gedung dan bangunan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembangunan gedung tahun 2018 sudah selesai pengerjaannya. Sehingga terdapat penambahan nilai aset gedung dan bangunan berupa Gedung Laboratorium BBTCLPP Yogyakarta.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan, dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan dan  
Irigasi Rp0

### C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Des 2018</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2018	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	-

Kantor BBTCLPP Yogyakarta tidak memiliki aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya  
Rp4.056.287.470

### C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp4.056.287.470 dan Rp4.056.287.470. Rincian Aset Tetap Lainnya terdiri dari koleksi buku perpustakaan, alat musik tradisional (seperangkat gamelan) dan Aset Tetap dalam renovasi sebesar Rp.3.921.346.100 dimana aset ini merupakan reklasifikasi aset gedung dan bangunan yaitu dari pekerjaan rehabilitasi gedung kantor yang merupakan gedung pinjam pakai pemda Yogyakarta.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>4.056.287.470</b>
Mutasi tambah (pembelian) :	-
- Koleksi Buku Perpustakaan	-
- Alat Musik Tradisional (gamelan)	-
Mutasi kurang:	-
- aset dihentikan penggunaannya	-
<b>Saldo per 31 Des 2018</b>	<b>4.056.287.470</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2018	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>4.056.287.470</b>

Posisi per 31 Desember 2018 tidak terdapat mutasi/perubahan terhadap aset Tetap Lainnya.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan Rp0

### C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp(24.805.764.341)

### C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp(24.805.764.341) dan Rp(21.459.141.373). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Per 31 Desember 2018*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	35.316.946.924	24.203.082.507	11.113.864.417
2	Gedung dan Bangunan	35.316.946.924	602.681.834	34.714.265.090
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	4.056.287.470	0	4.056.287.470
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>74.690.181.318</b>	<b>24.805.764.341</b>	<b>49.884.416.977</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp298.313.000

**C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp298.313.000 dan Rp230.965.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada BBTCLPP Yogyakarta berupa video company profile laboratorium lingkungan, website BBTCLPP Yogyakarta dan Sistem Informasi Laboratorium (SIL), dan software Enskripsi

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	178.770.000
Software	119.543.000
<b>Jumlah</b>	<b>298.313.000</b>

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>230.965.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	67.348.000
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Des 2018</b>	<b>298.313.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2018	(27.991.625)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>270.321.375</b>

Terdapat mutasi/perubahan saldo Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2018 berupa Pengembangan website BBTCLPP Yogyakarta sebesar Rp.20.500.000 dan pengembangan Sistem Informasi Laboratorium (SIL) sebesar Rp.46.848.000.

Aset Lain-Lain  
Rp508.713.000

### C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp508.713.000 dan Rp508.713.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional kantor BBTCLPP Yogyakarta.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>508.713.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
<b>Mutasi kurang:</b>	-
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- penghapusan BMN	
<b>Saldo per 31 Des 2018</b>	<b>508.713.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2018	(508.713.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>-</b>

Tidak terdapat mutasi/perubahan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dikarenakan proses penghapusan yang sudah dilaksanakan di bulan Desember 2018, hasil risalah lelang oleh KPKNL belum terbit. Sehingga penghapusan yang sudah terlaksana belum bisa tercatat di SIMAK BMN, menunggu risalah lelang diterbitkan oleh KPKNL Yogyakarta dan SK penghapusan dari Eselon 1.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan  
dan Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp(536.704.625)

### C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp(536.704.625) dan Rp(517.542.375). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software	119.543.000	27.991.625	91.551.375
Aset Tak Berwujud Lainnya	178.770.000	0	178.770.000
Aset Lain-lain	508.713.000	508.713.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>807.026.000</b>	<b>536.704.625</b>	<b>270.321.375</b>

Uang Muka dari KPPN  
Rp0

#### C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp.624.648

#### C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp624.648 dan Rp57.245.100. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018*

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	624.648	Kekurangan gaji (KGB) bulan juli sd Desember 2018
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	-	-
3	Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-	-
	<b>Total</b>	<b>624.648</b>	-

Pendapatan Diterima di  
MukaRp174.734.000

#### C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp174.734.000 dan Rp157.438.000 Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Berdasarkan Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor : HK.02.02/I/2919/31 tanggal 13 November 2017, bilamana BBTCLPP Yogyakarta belum dapat mengestimasi pendapatan secara andal, maka terhadap Pendapatan Diterima Dimuka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian di SAIBA.

Beban yang Masih  
harus Dibayar  
Rp624.648

#### C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp Rp624.648 dan Rp57.245.100, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.



Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2018 dan 2017

Keterangan	31-Des-18	31-Des-17
Beban belanja pegawai (kekurangan gaji dan tunjangan)	624.648	57.245.100
<b>Jumlah</b>	<b>624.648</b>	<b>57.245.100</b>

### C.27 Ekuitas

Ekuitas  
Rp67.867.429.411

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp67.867.429.411 dan Rp38.185.088.295. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB  
Rp2.577.623.160

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.577.623.160. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB Lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan (423216)	-	2.270.793.000	-100,00%
Pendapatan sewa tanah, Gedung dan Bangunan (425131)	4.863.923	-	0,00%
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi di Bidang Kes (425285)	2.534.040.054	-	0,00%
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (425421)	32.620.001	-	0,00%
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek (425431)	2.200.000	-	0,00%
<b>Jumlah Pendapatan Jasa</b>	<b>2.573.723.978</b>	<b>2.270.793.000</b>	<b>13,34%</b>
Pendapatan Lain-Lain			
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelenggaraan Pekerjaan (423752)	3.899.182	10.796.362	0,00%
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	-	-	0,00%
<b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>3.899.182</b>	<b>10.796.362</b>	<b>-63,88%</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.577.623.160</b>	<b>2.281.589.362</b>	<b>12,97%</b>

Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pendapatan jasa pemeriksaan sampel, dan penerimaan lain-lain (pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah).

Beban Pegawai  
Rp13.011.390.653

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp13.011.390.653 dan Rp12.724.858.810. Beban Pegawai adalah

beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	2018	2017	NAIK (TURUN)
Beban Gaji dan Tunjangan	7.590.046.887	7.781.681.385	-2,46%
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Keg)	5.391.849.766	4.917.222.425	0,00%
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0,00%
Beban Lembur	29.494.000	25.955.000	13,6%
<b>Jumlah</b>	<b>13.011.390.653</b>	<b>12.724.858.810</b>	<b>2,25%</b>

*Beban Persediaan  
Rp1.270.347.772*

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.270.347.772 dan Rp1.004.091.133. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	179.464.807	186.287.227	-3,66%
Beban Persediaan Bahan Baku	1.090.882.965	817.803.906	33,39%
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>1.270.347.772</b>	<b>1.004.091.133</b>	<b>26,52%</b>

*Beban Barang dan Jasa  
Rp3.037.332.065*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.037.332.065 dan Rp2.386.821.561. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	1.107.555.046	841.287.890	31,65%
Beban Barang Non Operasional	702.415.940	764.903.809	-8,17%
Beban Langganan Daya dan Jasa	484.295.879	471.526.451	2,71%
Beban sewa	2.450.000	0	0,00%
Beban Jasa Profesi	146.600.000	72.100.000	103,33%
Beban Jasa Lainnya	588.509.700	237.003.411	148,31%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan & Mesin	5.505.500	0	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>3.037.332.065</b>	<b>2.386.821.561</b>	<b>27,25%</b>

**D.5. Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan  
Rp757.217.444

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp757.217.444 dan Rp886.639.070. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	207.656.427	323.622.636	-35,83%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10.284.000	0	0,00%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	396.676.387	248.821.614	59,42%
Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	116.728.700	114.289.260	2,13%
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	25.871.930	52.466.560	-50,69%
Beban Persediaan Suku Cadang	0	147.439.000	-100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>757.217.444</b>	<b>886.639.070</b>	<b>-14,60%</b>

**D.6. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas  
Rp.3.036.045.422

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp960.631.000 dan Rp1.921.017.518. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.309.929.987	1.385.726.118	66,69%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	571.475.000	505.600.000	13,03%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.730.000	0	0,0%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	152.910.435	29.691.400	415,0%
<b>Jumlah</b>	<b>3.036.045.422</b>	<b>1.921.017.518</b>	<b>58,044%</b>

Beban Barang untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat  
Rp229.945.046

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp229.945.046 dan Rp280.994.701. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada Tahun 2015. Beban barang untuk diserahkan masyarakat di BBTCLPP Yogyakarta berupa barang/bahan logistik bantuan KLB di wilayah DIY dan Jawa Tengah, bahan pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan ke Pemda (rumah sakit daerah), dan Alat/ Model Teknologi Tepat Guna. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat /Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	229.945.046	280.944.701	-22,18
<b>Jumlah</b>	<b>229.945.046</b>	<b>280.944.701</b>	<b>-22,18</b>

Beban Bantuan Sosial  
Rp0

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial pada periode 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	2018	2017	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp3.368.090.218

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.368.090.218 dan Rp2.676.074.448. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.837.509.025	2.507.598.955	13,16%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	509.113.943	161.118.718	215,99%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	0,00%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00%
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>3.346.622.968</b>	<b>2.668.717.673</b>	<b>25,40%</b>
			<b>0,00%</b>
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	21.467.250	6.524.375	0,00%
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	832.400	-100,00%
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>21.467.250</b>	<b>7.356.775</b>	<b>191,80%</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>3.368.090.218</b>	<b>2.676.074.448</b>	<b>25,86%</b>

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Rp0

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp(0) dan Rp(11.200). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	0	-11.200	-100%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-100,0%</b>

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
Rp7.006.890

**D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN	2018	2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	250.645.746	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	448.949.781	(100)
Pendapatan Keg Non Oprs Lainnya (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL)	0	1.984.649	(100)
Pendapatan Keg Non Oprs Lainnya (Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL)	0	243.440	(100)
Pendapatan Keg Non Oprs Lainnya (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL)	4.412.050	0	0,00
Defisit Selisih Kurs	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	2.594.840	39.126.514	-0,93
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	982.940	0,00
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>7.006.890</b>	<b>(157.932.372)</b>	<b>(1,03)</b>

\*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos-Pos Luar Biasa Rp

**D.12 POS-POS LUAR BIASA**

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN	2018	2017	NAIK (TURUN) %
<b>Defisit Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Pada periode 31 Desember 2018 tidak terdapat pos Luar biasa, karena tidak ada kegiatan darurat.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal

Rp38.185.088.295

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp38.185.088.295 dan Rp28.815.246.615.

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus/ (Defisit) LO

Rp(22.125.738.570)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp(22.125.738.570) dan Rp(19.756.779.051). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luarbiasa.

### E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan

Akuntansi/Kesalahan

Mendasar

Rp0

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp0

### E.4 Koreksi Yang menambah / Mengurangi Ekuitas

#### E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0

Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian atas nilai persediaan yang diakibatkan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan

Rp0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Bahan Baku	-
Bahan Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

#### E.4.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan

Tetap Rp0

penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap berasal dari penilaian ulang atas asset tanah serta asset Gedung dan Bangunan oleh tim penertiban asset (KPKNL).

#### E.4.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap  
Non Revaluasi  
Rp2.305.000

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.2.305.000 dan Rp(5.435.446). Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 merupakan nilai Normalisasi Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah.

##### Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2018

Jenis Aset Tetap	Koreksi		Total
	Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	-	2.305.000	2.305.000
Gedung dan Bangunan	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Aset Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>2.305.000</b>

#### E.4.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain  
Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

##### Rincian Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2018

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

#### E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas  
Rp51.805.774.686.

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp51.805.774.686 dan Rp24.908.189.492. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:



*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(2.582.035.210)
Ditagihkan ke Entitas Lain	54.020.194.896
Transfer Masuk	367.615.000
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>51.805.774.686</b>

**E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp2.582.035.210 sedangkan DKEL sebesar Rp54.020.194.896.

**E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp367.615.000 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Alat Pewarna Slide Filariasis	Direktorat P2VTZ	249.415.000
2	Bahan reagen Sentinel JE	Direktorat P2VTZ	47.600.000
3	Mikroskop Binokuler Filariasis	Direktorat P2VTZ	70.600.000
	<b>Jumlah</b>		<b>367.615.000</b>

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

**E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai

dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp0.

*Rincian pengesahan Hibah untuk per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:*

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Kantor BBTKLPP Yogyakarta sampai dengan posisi laporan 31 Desember 2018 tidak ada hibah langsung.

*Ekuitas Akhir*

*Rp67.867.429.411*

#### **E.6 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.67.867.429.411 dan Rp38.185.088.295.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

1. BBTCLPP Yogyakarta di tahun anggaran 2018 mendapatkan sumber dana dari APBN sebesar Rp.56.920.595.000. Selama TA 2018 terjadi 5 kali revisi DIPA dalam rangka pemutahuran data/ penyesuaian kegiatan bagian dan bidang yaitu :
  - a. Revisi ke-1 dengan nomor DIPA-024.05.2.415686/2018 Revisi 1 tanggal 9 Maret 2018;
  - b. Revisi ke-2 dengan nomor DIPA-024.05.2.415686/2018 Revisi 2 tanggal 29 Maret 2018;
  - c. Revisi ke-3 dengan nomor DIPA-024.05.2.415686/2018 Revisi 3 tanggal 12 Juli 2018;
  - d. Revisi ke-4 dengan nomor DIPA-024.05.2.415686/2018 Revisi 4 tanggal 9 Oktober 2018;
  - e. Revisi ke-5 dengan nomor DIPA-024.05.2.415686/2018 Revisi 5 tanggal 27 November 2018;
2. Penyerapan anggaran periode 31 Desember 2018 mencapai 94,90% dari pagu anggaran. Anggaran terbesar yaitu untuk belanja modal gedung dan bangunan yaitu berupa pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan BBTCLPP Yogyakarta. Pembangunan gedung sudah terselesaikan 100% di tahun anggaran 2018..
3. Sampai dengan periode 31 Desember 2018 terdapat pengadaan aset dibawah nilai kapitalis sehingga menghasilkan aset ekstrakomtabel. Pengadaan tersebut antara lain sebagai berikut:
  - Pengadaan alat pendukung TTG sebesar Rp13.970.000 dengan jumlah pembelian sebanyak 12 item barang, dimana 6 item barang diantaranya dengan harga satuan dibawah nilai kapitalis. Total nilai barang di bawah nilai kapitalis tersebut sebesar Rp.3.850.000.
  - Pengadaan peralatan Laboratorium Kesehatan sebesar Rp.145.921.600 dengan jumlah pembelian sebanyak 10 item barang, dimana 2 (dua) item barang diantaranya dengan harga satuan dibawah nilai kapitalis. Total nilai barang di bawah nilai kapitalis tersebut sebesar Rp.1.655.500.

Sehubungan dengan pembelian aset dibawah nilai kapitalis telah menghasilkan peralatan dan Mesin belum diregister. Dan berdasarkan PMK No.181/PMK.06/2018, terhadap alat dan mesin belum diregister tersebut jika tidak bisa dilakukan ralat SPM maka harus dilakukan jurnal penyesuaian yaitu peralatan dan mesin belum diregister pada koreksi beban aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin.

4. Adanya Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) belanja modal telah memunculkan aset tetap belum diregister yaitu sebagai berikut :
  - a. Honor kegiatan pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp.4.500.000, telah memunculkan aset gedung dan bangunan belum diregister sebesar Rp.4.500.000.
  - b. Honor PTK kegiatan pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp.6.840.000, telah memunculkan aset gedung dan bangunan belum diregister sebesar Rp.6.840.000.

Terhadap SSPB tersebut petugas SIMAK BMN sudah melakukan koreksi KDP. Hal ini dikarenakan belanja modal gedung dan bangunan masih tercatat sebagai KDP. Terhadap aset belum diregister tersebut harus dilakukan jurnal umum yaitu gedung dan bangunan belum di register pada koreksi nilai aset tetap non revaluasi sesuai lampiran surat Dirjen perbendaharaan nomor S-9861/PB/2018 tanggal 28 Desember 2018 yaitu perlakuan akuntansi atas transaksi akhir tahun 2018.

4. Di tahun 2018 satker BBTCLPP Yogyakarta mendapat transfer masuk dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2VTZ). Transfer masuk tersebut antara lain sebagai berikut:
  - Alat Pewarnaan Slide Filariasis sebanyak 1 (satu) unit seharga Rp.249.415.000. Transfer masuk tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor: KN.02.03/6/1156/2018 tanggal 2 Mei 2018.
  - Bahan reagen sentinel JE sebanyak 2 PT dengan total harga sebesar Rp.47.600.000 sesuai BAST tanggal 7 Juni 2018.
  - Mikroskop Binokuler Filariasis sebanyak 4 (empat) unit total nilai Rp.70.600.000.

5. Aset yang dihentikan dalam operasi pemerintah senilai 508.713.000 telah dilakukan proses penghapusan di tahun 2018. Proses penghapusan terdiri dari 2 paket penghapusan yaitu:
  - a. Lelang Paket 1 untuk peralatan dan mesin dengan nilai perolehan di atas seratus juta telah dilaksanakan di bulan Desember 2018 dengan nilai limit sebesar Rp.459.000. Dikarenakan Paket lelang 1 terjadi wanprestasi dimana pemenang lelang tidak melakukan

pembayaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka lelang paket 1 dinyatakan gagal dan harus dilakukan proses pengajuan lelang ulang ke KPKNL.

b. Lelang Paket 2 untuk peralatan dan mesin dengan nilai perolehan di bawah seratus juta telah dilakukan lelang di bulan Desember 2018 dengan nilai limit sebesar Rp.62.500. Paket lelang 2 oleh pemenang lelang sudah dilakukan penyetoran ke kas negara melalui Bendahara KPKNL Yogyakarta bulan Januari 2018. Oleh karena hasil risalah lelang paket-2 belum dikeluarkan oleh KPKNL Yogyakarta, maka petugas SIMAk BMN belum bisa melakukan pencatatan pengeluaran atas aset yang dihentikan penggunaan dalam operasi pemerintah tersebut.

6. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor : HK.02.02/1/2919/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dalam hal ini BBTCLPP Yogyakarta sebagai satker yang mempunyai penerimaan PNBFP fungsional berupa Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi sesuai dengan Tupoksi telah menerapkan sistem pembayaran dilakukan di muka. Perlakuan Akuntansi atas transaksi pendapatan dengan pembayaran dimuka menyebabkan posisi per 31 Desember 2018 terdapat pendapatan diterima dimuka. Mengacu PMK No.224/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.219/PMK.05/2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dalam Bab 11 tentang kebijakan pendapatan menyebutkan tingkat penyelesaian pekerjaan tidak dapat diestimasi secara andal, dan sehubungan BBTCLPP Yogyakarta belum dapat mengestimasi pendapatan secara andal, maka terhadap Pendapatan Diterima Dimuka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian di SAIBA, tapi cukup dicatat dan dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Besarnya Pendapatan diterima Dimuka per 31 Desember 2018 satker BBTCLPP Yogyakarta sebesar Rp.174.734.000. Adapun daftar rincian terlampir dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan PP Yogyakarta  
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,  
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap

NO	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d Periode Ini	Beban Penyusutan Periode Ini	Akumulasi Peny. Periode Ini	Tot. Akum Penyusutan s.d Periode ini	Nilai Buku per 31 Desember 2018
<b>A</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		<b>35.316.946.924</b>	<b>21.365.573.482</b>	<b>2.837.509.025</b>	<b>0</b>	<b>24.203.082.507</b>	<b>11.113.864.417</b>
1	ALAT BANTU	7	146.898.000	114.552.281	6.661.431	0	121.213.712	25.684.288
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	4.328.176.253	2.230.726.069	442.007.861	0	2.672.733.930	1.655.442.323
3	ALAT BENGKEL BERMESIN	10	11.620.000	4.370.000	962.000	0	5.332.000	6.288.000
4	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	35.398.000	34.058.200	446.600	0	34.504.800	893.200
5	ALAT UKUR	5	1.168.493.553	986.338.255	54.918.310	0	1.041.256.565	127.236.988
6	ALAT PENGOLAHAN	4	138.189.420	82.939.361	26.796.750	0	109.736.111	28.453.309
7	ALAT KANTOR	5	551.799.820	314.981.865	81.959.042	0	396.940.907	154.858.913
8	ALAT RUMAH TANGGA	5	1.273.404.560	917.178.890	152.561.130	0	1.069.740.020	203.664.540
9	ALAT STUDIO	5	226.474.240	185.810.704	15.774.008	0	201.584.712	24.889.528
10	ALAT KOMUNIKASI	5	118.368.340	104.719.840	4.233.000	0	108.952.840	9.415.500
11	PERALATAN PEMANCAR	10	595.360.000	201.845.750	59.536.000	0	261.381.750	333.978.250
12	ALAT KEDOKTERAN	5	363.704.950	309.399.650	22.813.800	0	332.213.450	31.491.500
13	ALAT KESEHATAN UMUM	5	61.400.000	43.271.000	6.164.000	0	49.435.000	11.965.000
14	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	18.252.972.181	11.140.309.987	1.261.227.162	0	12.401.537.149	5.851.435.032
15	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15	1.844.281.510	825.147.554	122.952.115	0	948.099.669	896.181.841
16	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15	318.535.118	44.926.558	21.235.692	0	66.162.250	252.372.868
17	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10	401.450.000	400.139.750	351.500	0	400.491.250	958.750
18	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10	15.000.000	750.000	1.500.000	0	2.250.000	12.750.000
19	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7	2.738.738.735	1.764.666.787	218.328.152	0	1.982.994.939	755.743.796
20	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15	77.960.500	15.135.315	5.197.366	0	20.332.681	57.627.819
21	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	10	342.396.705	131.183.955	28.105.700	0	159.289.655	183.107.050
22	PERSENJATAAN NON SENIATA API	3	65.025.900	62.545.900	413.334	0	62.959.234	2.066.666
23	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4	397.250.375	345.861.922	28.539.469	0	374.401.391	22.848.984
24	KOMPUTER UNIT	4	810.584.665	495.709.785	128.205.325	0	623.915.110	186.669.555
25	PERALATAN KOMPUTER	4	537.840.467	293.502.465	88.589.574	0	382.092.039	155.748.428
26	ALAT PELINDUNG	5	21.740.000	10.270.000	4.348.000	0	14.618.000	7.122.000
27	ALAT SAR	2	60.970.000	58.598.750	1.933.750	0	60.532.500	437.500
28	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	409.703.632	243.957.889	51.212.954	0	295.170.843	114.532.789
29	PERALATAN OLAH RAGA	6	3.210.000	2.675.000	535.000	0	3.210.000	-

NO	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d Periode Ini	Beban Penyusutan Periode Ini	Akumulasi Peny. Periode Ini	Tot. Akum Penyusutan S.D Periode Ini	Nilai Buku per 31 Des 2018
<b>B</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		<b>40.791.848.640</b>	<b>93.567.891</b>	<b>509.113.943</b>	<b>0</b>	<b>602.681.834</b>	<b>40.189.166.806</b>
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	39.737.516.440	80.105.565	485.039.371	0	565.144.936	39.172.371.504
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50	637.175.000	7.862.111	15.724.222	0	23.586.333	613.588.667
3	TUGU/TANDA BATAS	50	417.157.200	5.600.215	8.350.350	0	13.950.565	403.206.635
<b>C</b>	<b>ASET LAINNYA (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan)</b>		<b>508.713.000</b>	<b>508.713.000</b>	-	<b>0</b>	<b>508.713.000</b>	<b>0</b>
4	ALAT KANTOR	5	1.483.000	1.483.000	-	0	1.483.000	0
5	ALAT RUMAH TANGGA	5	-	-	-	0	-	0
11	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	494.230.000	494.230.000	-	0	494.230.000	0
17	KOMPUTER UNIT	4	13.000.000	13.000.000	0	0	13.000.000	0
<b>D</b>	<b>SOFTWARE</b>		<b>119.543.000</b>	<b>6.524.375</b>	<b>21.467.250</b>	<b>-</b>	<b>27.991.625</b>	<b>91.551.375</b>
1	SOFTWARE KOMPUTER	4	119.543.000	6.524.375	21.467.250	0	27.991.625	91.551.375
	<b>TOTAL</b>		<b>76.737.051.564</b>	<b>21.974.378.748</b>	<b>3.368.090.218</b>	<b>0</b>	<b>25.342.468.966</b>	<b>51.394.582.598</b>